

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press.
- Arief Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor.
- Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fielmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Ngandung, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.



I.S., 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UII-Press, Jakarta.

Subadi, 2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Jurnal :

Abdul Rahman Upara, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism, Vol. 5 No. 1. Januari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.

